

Dinamika Lingkungan Nasional dan Global Perkebunan: Implikasi Strategis bagi Pembangunan Perkebunan

(Bagian Pertama dari Dua Tulisan)

Perkebunan berperan penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi dalam pendapatan nasional, penyediaan lapangan kerja, serta penerimaan ekspor dan pajak. Dalam perkembangannya, subsektor perkebunan sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik telah membuka kesadaran dan cakrawala baru. Sektor pertanian, khususnya perkebunan, yang akhir-

akhir ini daya tariknya tertutupi oleh glamornya sektor industri, mencuat kembali sebagai sektor usaha yang menarik. Bahkan berbagai kalangan menilai, usaha di bidang perkebunan cukup strategis bagi

perekonomian Indonesia, paling tidak selama 20-30 tahun mendatang. Salah satu daya tarik utamanya, sesuai dengan perjalanan sejarahnya, adalah sebagai penghasil devisa. Selain itu, dengan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, maka pendapatan petani dalam rupiah meningkat tajam. Apabila dikelola dengan baik, peningkatan pendapatan ini akan membuka peluang bagi pemupukan modal guna meningkatkan kinerja perkebunan.

Namun, bersamaan dengan merebaknya krisis ekonomi menjadi krisis multidimensi, perkebunan pun mengalami imbas. Berbagai permasalahan melingkupi subsektor perkebunan dan sebagian di antaranya merupakan permasalahan yang menunjuk pada kegagalan

pemerintah dalam pembangunan perkebunan. Permasalahan-permasalahan tersebut diuraikan berikut ini.

Masalah yang Berkaitan dengan Kepentingan Rakyat dan Nasional

Orientasi kebijakan perkebunan sejauh ini membedakan secara tajam antara perkebunan besar (BUMN dan swasta, termasuk PMA) dan perkebunan rakyat. Kebijakan dualistik ini telah memberikan kemudahan bagi yang “besar” dan tekanan bagi yang “kecil”.

Masalah Manajemen Pengelolaan Perkebunan

Kebijakan pengembangan perkebunan yang ekstensif sejauh ini telah mengesampingkan produktivitas, efisiensi, dan pengembangan produk. Dengan berbagai upaya pembangunan, secara umum beberapa komoditas mengalami kenaikan produktivitas, namun secara umum produktivitas tersebut masih rendah dan berpeluang untuk ditingkatkan. Rendahnya produktivitas komoditas perkebunan merupakan tantangan bagi pembangunan perkebunan ke depan.

Masalah Pemasaran dan Ekonomi

Pada pasar primer, yaitu pasar hasil perkebunan rakyat, pekebun yang berjumlah ribuan dan terpecah berhadapan dengan beberapa pedagang (desa sampai kabupaten), dan karena sifat produk perkebunan yang harus diolah berhadapan dengan “kelompok” industri pengolahan primer. Struktur pasar yang berkembang cenderung mengarah ke struktur pasar tidak bersaing (oligopsoni). Pengembangan perkebunan rakyat, seperti di daerah Perusahaan Inti Rakyat (PIR) untuk mengubah struktur pasar oligopsoni justru terjebak pada munculnya struktur pasar monopsoni di mana pekebun ber-

hadapan langsung dengan industri pengolahan.

Produk perkebunan umumnya diperdagangkan secara internasional sehingga mekanisme pasar mengikuti yang terjadi di pasar dunia. Dengan keterbatasan akses, pekebun pada perkebunan rakyat tidak mendapatkan informasi pasar secara efektif. Informasi pasar (harga, mutu, jumlah yang dibutuhkan, dan lain-lain) diperoleh dari pedagang atau industri pengolahan. Akibatnya, pekebun memperoleh informasi pasar yang tidak simetris.

Secara nasional, pangsa pasar beberapa produk perkebunan utama cenderung menurun dari waktu ke waktu, tergeser oleh negara pesaing seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, India, dan Sri Lanka. Hal ini mengindikasikan bahwa daya saing industri dan produk perkebunan Indonesia masih sangat lemah.

Perekonomian perkebunan juga masih didominasi oleh produk primer perkebunan. Padahal, potensi untuk mengembangkan industri hilir perkebunan masih terbuka dan pasar produk hilir perkebunan lebih prospektif. Malaysia merupakan salah satu contoh negara produsen produk perkebunan, baik primer maupun hilir.

Masalah Sosial Budaya

Krisis multidimensi telah memicu terjadinya konflik sosial di daerah perkebunan. Masalah konflik sosial ini terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

- Pasar lahan tidak dapat mengalokasikan lahan secara efisien dan adil terutama dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta kebijakan pengalokasian lahan masa lalu yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kepemilikan lahan perkebunan rakyat rata-rata adalah 0,92 ha/petani, sementara perkebunan besar mengelola lahan sekitar 1.947 ha/unit usaha.
- Tata letak dan kebijakan di bidang agraria tidak kompatibel dengan

perkembangan dan kondisi sosial masyarakat.

- Sistem administrasi pertanahan belum tertib, terutama dengan terjadinya duplikasi pemilikan atau penguasaan lahan.
- Lahan yang tersedia belum dimanfaatkan secara efisien dan produktif. Untuk lahan HGU perkebunan besar, dari sekitar 4,6 juta hektar, saat ini baru dimanfaatkan untuk tanaman, bangunan dan emplasemen sekitar 60%.
- Kepastian hukum masyarakat terhadap lahan belum terjamin.
- Makin kompetitifnya alternatif penggunaan lahan, terutama dengan pemukiman dan industri.
- Masih terdapat lahan perkebunan rakyat yang berada pada kawasan hutan dan telah berlangsung cukup lama dari generasi ke generasi.
- Pemilikan lahan masih berfungsi sebagai komoditas perdagangan (belum melihat lahan dari azas manfaat).
- Dari segi penyediaan fasilitas pembiayaan, untuk perkebunan besar swasta nasional yang mencakup 2 juta hektar, yang dibiayai dari dana kredit mencapai 1,6 juta hektar (80%), sedangkan pada perkebunan rakyat, dari 11,2 juta hektar yang ada, yang dibiayai dengan kredit hanya 2 juta hektar (18%). Angka tersebut menunjukkan masih rendahnya perhatian lembaga keuangan terhadap pembangunan perkebunan rakyat, sebagaimana telah digambarkan memiliki potensi yang sangat besar.

Masalah Lingkungan

Pembukaan lahan perkebunan yang efisien adalah dengan pembakaran. Namun, cara ini menimbulkan dampak lingkungan yang sangat merugikan. Pembukaan lahan dengan pembakaran dilakukan baik di perkebunan rakyat maupun perkebunan besar. Undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup masih memberi toleransi adanya pem-



Usaha perkebunan masih cukup strategis bagi perekonomian Indonesia, paling tidak untuk 20-30 tahun ke depan.

bakaran terkendali untuk perkebunan rakyat dan pelarangan untuk perkebunan besar.

Limbah padat, cair, dan gas masih menjadi masalah penting di perkebunan, baik pada tingkat *on farm* maupun pabrik. Masalah ini timbul, dalam batas tertentu, karena belum adanya teknologi penanganan limbah, mahalnya investasi industri pemanfaatan limbah perkebunan, rendahnya kesadaran penanganan limbah, dan lemahnya penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan limbah.

Masalah Iptek

Apresiasi dan perhatian terhadap hasil iptek di bidang perkebunan masih rendah. Iptek dianggap belum menjadi bagian integral dari pengembangan usaha perkebunan. Penyediaan dana penelitian dan pengembangan perkebunan masih mengandalkan pemerintah dan sebagian kecil dari BUMN dan swasta. Dengan keterbatasan tersebut, lembaga penelitian perkebunan hingga kini belum berhasil melakukan transfer teknologi, terutama ke perkebunan rakyat secara efektif. Transfer teknologi masih terbatas pada daerah-daerah pengembangan perkebunan rakyat.

Masalah SDM

Permasalahan perkebunan lainnya terkait dengan masalah kualitas sumber daya manusia perkebunan, baik dari kalangan petani, pengusaha maupun aparat pemerintah. Sampai saat ini masih dijumpai berbagai permasalahan sebagai berikut:

- Mentalitas yang hidup dan berkembang di masyarakat belum mendukung berkembangnya nilai-nilai yang dibutuhkan untuk kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, sebagian masyarakat masih sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah.
- Daya asimilasi dan absorpsi terhadap teknologi masih lemah, terlihat dari terbatasnya (sekitar 20%) masyarakat petani yang menggunakan klon unggul dalam usaha kebunnya.
- Kemampuan teknis, wirausaha, dan manajemen masih rendah. Dengan kondisi ini, petani ataupun kelembagaan ekonomi petani belum mampu memanfaatkan peluang bisnis yang ada di lingkungannya.
- Kemampuan melobi masih rendah, padahal kemampuan ini dibutuhkan untuk memperluas peluang usaha, baik petani maupun dunia usaha.

Masalah Kelembagaan

Permasalahan perkebunan juga terkait dengan masalah kelembagaan. Kelembagaan yang ada masih belum mampu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mempertanggung jawabkan struktur komoditas dan efisiensi seluruh rangkaian kegiatan. Penumbuhan kelembagaan petani dan pengembangan kemitraan usaha antara petani dan pengusaha atau perkebunan besar masih menghadapi beberapa kendala sebagai berikut:

- Terjadinya ekonomi dualistik antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar, maupun antara hulu dan hilir yang sering menimbulkan konflik.
- Terjadinya praktek-praktek kegiatan monopoli, oligopoli, dan monopsoni spasial terutama pada kegiatan hilir sehingga usaha tidak efisien.
- Kelembagaan petani masih lemah, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Lemahnya kelembagaan ini kemungkinan karena adanya intervensi yang berlebihan dari pemerintah, terutama pada masa lampau pada saat pembentukan KUD yang justru banyak merusak tatanan kelembagaan masyarakat.
- Kelembagaan permodalan dan investasi kurang mendukung. Dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, diperlukan lembaga keuangan alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pengembangan hutan dan kebun.
- Kelembagaan yang menjamin keberpihakan kepada petani masih lemah. Hal ini terjadi kemungkinan karena adanya anggapan bahwa petani tidak mampu mengembangkan usahanya secara ekonomis.
- Kelembagaan pendidikan perkebunan masih terbatas, padahal lokasi pengembangan perkebunan sebagian besar di luar Jawa.
- Kelembagaan pemasaran masih lemah. Pasar ekspor komoditas perkebunan selama ini terkonsentrasi pada negara pengimpor

tradisional, sedangkan untuk pasar baru masih terbatas.

- Kelembagaan iptek belum optimum, terutama kemampuan kelembagaan iptek yang benar-benar mampu menghasilkan iptek yang dibutuhkan oleh dunia usaha.
- Kelembagaan informasi belum berkembang, baik informasi di bidang iptek maupun pasar.
- Kelembagaan pertanahan masih lemah, yang ditunjukkan oleh makin banyaknya kasus-kasus lahan yang sering menimbulkan konflik.

Masalah Otonomi Daerah

Otonomi daerah menuntut pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi ini akan mendorong terjadinya kompetisi pemanfaatan sumber daya alam sehingga ketimpangan antara daerah satu dengan yang lain dapat saja terjadi. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam ini, pedoman/acuan pelaksanaan bagi daerah sangat diperlukan sehingga tidak timbul kesulitan pada tataran perencanaan pengembangan, inves-

tasi, produksi, hingga perdagangan (*Bambang Dradjat*).

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Lembaga Riset Perkebunan Indonesia

Jln. Salak No. 1A

Bogor 16151

Telepon : (0251) 333382

333088

333089

Faksimile : (0251) 315985

E-mail : ipardboo@indo.net.id